PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA

RAHMAD GANDHI

rahmadgandi23@gmail.com

20220076

AKBP STIE AKBP PADANG

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman yang mengalami kemajuan dan keemasan ini terlihat potensi masyarakat akan budaya sendiri mulai menghilang. Tergesernya oleh budaya asing yang tak terbandung dalam menangganinya. Bahkan masyarakat kini cenderung mengikuti budaya barat yang ngetrend. Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri dari setidaknya 13.000 pulau. Bahwa pluralitas di satu pihak adalah aset bangsa jika dikelola secara tepat, di pihak lain pluralitas juga membawa bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistik itu hanya suatu pressing faktor dalam realitas ikatan negara. Di tengah situasi bangsa Indonesia yang seperti itu, nasionalisme sangat di butuhkan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar bagi negara indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dengan ditempatkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Indonesia. Disamping faktor utama Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat faktor Undang-Undang 1945. Faktor Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu sama lain baik dalam teori maupun praktek ketatanegaraan. Di satu pihak Pancasila sebagai sistem dasar dan merupakan landasan ideal maka di pihak lain UUD 1945 adalah sub sistem dari Pancasila yang merupakan landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumbar dari dari segala sumber hukum, merupakan pedoman tertinggi dan kaidah dasar Hukum Nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa.

B. PEMBAHASAN

Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, Ideologi Bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia dimana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila.

Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

- a) **PANCASILA SEBAGAI JIWA KEPERIBADIAN BANGSA INDONESIA**
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri - ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri- ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

- b) **TUJUAN PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA** Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide yang merupakan perkembangan dari pemikirannya tentang persatuan tiga aliran besar: Nasionalisme, Islam, dan *Marxis*. Pemahamannya tentang tiga hal ini berbeda dengan pemahaman orang lain yang mengkaitkan ketiganya tidak dapat disatukan. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya dia menyatakan, “Saya tetap nasionalis, tetap Islam, tetap *Marxis*, *Sintese* dari tiga hal inilah memenuhi saya punya dada. Satu *sintese* yang menurut anggapan saya sendiri adalah *sintese* yang *geweldig* (Soekarno dalam Yatim, 2001: 155)

Dalam artikel itu, dia juga menjelaskan bahwa Islam telah menebalkan rasa dan haluan nasionalisme. Cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai Soekarno tidak bertentangan dengan konsep nasionalismenya. Pemisahan itu tidak berarti menghilangkan kemungkinan untuk memberlakukan hukum-hukum Islam dalam negara, karena bila anggota parlemen sebagian besar orang-orang yang berjiwa Islam, mereka dapat mengusulkan dan memasukkan peraturan agama dalam undang-undang

negara. Itulah cita ideal negara Islam menurut Soekarno (ibid, 2001:156). Dengan dasar pemikiran itulah, Soekarno mengusulkan lima asas untuk negara Indonesia merdeka. Kelima asas itu adalah:

- 1)Kebangsaan Indonesia
- 2)Internasionalisme atau peri kemanusiaan,
- 3)Mufakat atau demokrasi
- 4)Kesejahteraan sosial,
- 5)Ketuhanan

Sejarah Kebangsaan : Mengapa Pancasila? • Ditinjau dari cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata, “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya panca berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas atau dasar, Pancasila mempunyai arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan kesusilaan atau peraturan tingkah laku yang baik (Daroeso dan Suyahmo, 1989:23). • Menurut Darmodihardjo dalam Daroeso dan Suyahmo (1989:23) Pancasila sudah dikenal sejak jaman Majapahit yang ditulis dalam buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Pancasila selain mempunyai arti “berbatu sendi lima” juga memiliki arti Pelaksanaan Lima Kesusilaan atau Panca Krama yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras.

• Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari Pancasila secara kontemporer merupakan konsep yang berangkat dari nilai kebudayaan dan sejarah yang telah ada jauh sebelum Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa modern. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar tidak hadir secara alamiah akan tetapi hadir dari hasil pengembangan konsep Indonesia sebagai Nusantara di masa lampau. 10 Sejarah Kebangsaan : Mengapa Pancasila? • Ditinjau dari perspektif sejarah dalam lintasan proses konseptualisasi Pancasila resmi dilahirkan tanggal 1 Juni 1945. Pada saat perumusan dasar negara tersebut dalam masa persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), hadir perwakilan dari berbagai golongan di Indonesia, yaitu; golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, golongan wakil kerajaan, golongan pangreh praja (residen dan wakil, bupati, walikota), serta golongan peranakan (Tionghoa, Arab, Belanda).

• Bahkan, perwakilan wanita pun sudah ada dan ikut berperan dengan hadirnya Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Pada prosesnya sebagai dasar negara Pancasila harus mendapatkan persetujuan kolektif

melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Kecil dari BPUPKI yang berjumlah 9 orang yang berhasil menyepakati perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan akhir Piagam Jakarta dilakukan pengesahan melalui proses konstitusional pada 18 Agustus 1945 (Latif, 2011:47-51). • Seluruh proses perumusan dan persetujuan tentang konsensus nasional berupa Pancasila yang melibatkan berbagai unsur dan golongan tersebut menunjukkan arti penting Pancasila sebagai hasil kesepakatan nasional dan sebagai representasi persatuan dari keberagaman Indonesia (Indrawan, Ahmad, dan Mahinwa, 2017:15).

Ada beberapa ancaman terhadap Pancasila:

1. Di tingkat substantif Pancasila belum sepenuhnya menjadi prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi yang dirumuskan para penyelenggara negara.
2. Dalam tingkat implementasi, Pancasila saat ini diuji dan terancam kehilangan daya tahannya untuk menjaga "kehendak bersama". Selama 32 tahun Pancasila lebih diberdayakan sebagai alat politik, hal ini menimbulkan eksese negatif timbulnya stigma negatif pada Pancasila sebagai sebuah doktrin.
3. Ancaman terhadap Pancasila terjadi karena adanya inkonsistensi penerapan, sila-sila Pancasila hanya dimaknai sebagai kata-kata retorik.
 - a. Nilai ketuhanan dinodai oleh perilaku koruptif dan sekulerisme yang ekstrem.
 - b. Nilai kemanusiaan masih dicerai dengan pengabaian hak-hak dasar rakyat,
 - c. Nilai persatuan dibatasi pada aspek kesatuan kewilayahan semata.
 - d. Nilai permusyawaratan lebih mengarah pada demokrasi yang prosedural.
 - e. Nilai keadilan sosial belum secara sungguh-sungguh menjadi dasar kebijakan ekonomi makro.

C. PENUTUP

Dalam perwujudan nilai kebangsaan, Pancasila sebagai kristalisasi harus dipahami sebagai permufakatan bersama. Hal ini berangkat dari pemahaman akan pelaksanaan dan pengamalan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa atau sebagai konsensus dasar. Pancasila menjadi pilihan bangsa Indonesia karena karakteristiknya yang sangat tepat bagi kondisi masyarakat yang beragam, Pancasila mampu dan dapat merepresentasikan semua unsur dan golongan, dengan kata lain Pancasila akan tetap relevan dalam setiap perubahan era. Dengan demikian sebagaimana disampaikan Soekarno, dalam perwujudannya khususnya dalam perundang-undangan Pancasila merupakan Leitstar (bintang pimpinan) dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan, sekaligus unsur “meja statis” yang menopang bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara untuk semua atau negara gotong royong yang sejahtera.

Daftar pustaka:

- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.